

**CRITICAL SUCCESS FACTORS DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS  
DARI TAHUN 2019 SAMPAI 2024**

Isna Khoirunnisa', Budi Puspo Priyadi

**Program Studi S1 Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*The high poverty rate after the reformation shows the weak implementation of social policies in Indonesia. Reform is an important starting point because it shows the impact of the crisis and political changes on the effectiveness of poverty alleviation policies. This study focuses on the second term of President Joko Widodo's administration 2019-2024 which experienced a political transition from a divided government to a unified government which affected policy implementation. This study chose poverty alleviation policies because of the national urgency in eliminating extreme poverty. There are many studies on the implementation of poverty alleviation policies. However, research on the structure of knowledge development and its success factors is still limited. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method for scientific publications in 2019-2024 to identify the structure of knowledge development and critical success factors in the implementation of poverty alleviation policies in Indonesia. Data collection through the Google Scholar electronic database with PRISMA guidelines, namely identification, screening, eligibility, and included. Data extraction and visualization with Microsoft Excel and Vosviewer. The results of the study show that the development of publications has increased. The keywords "implementation" and "policy" are the most dominant, 12 related keywords were detected. 12 poverty alleviation policies were found, the majority of which were in the form of social assistance. In addition, six critical success factors were found, namely communication; resources; disposition; bureaucratic structure; social, economic, and political environment; and policy standards and objectives. These six factors are related to the theory of successful policy implementation by Van Meter and Van Horn (1975). In addition, the author keyword analysis shows that the keywords "supervision" and "coordination" are relevant to one of the findings of critical success factors, namely bureaucratic structure. This study is expected to contribute to strengthening the implementation of poverty alleviation policies in Indonesia.*

**Keywords:** *poverty alleviation, policy implementation, systematic literature review, bureaucratic structure*

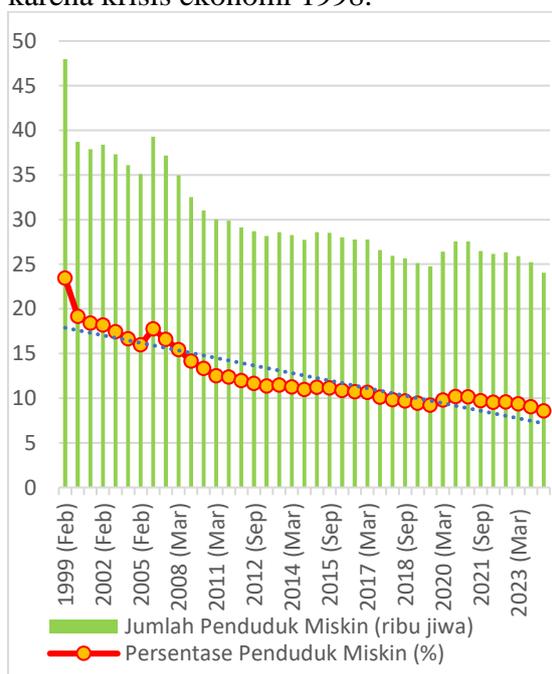
## ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan pasca reformasi menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan sosial di Indonesia. Reformasi menjadi titik awal penting karena memperlihatkan dampak krisis dan perubahan politik terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024 yang mengalami transisi politik beralih dari *divided government* menjadi *unified government* sehingga memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini memilih kebijakan penanggulangan kemiskinan karena adanya urgensi nasional dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Banyak penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Namun, penelitian mengenai struktur perkembangan pengetahuan dan faktor keberhasilannya masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap publikasi ilmiah tahun 2019-2024 untuk mengidentifikasi struktur perkembangan pengetahuan dan *critical success factors* dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pengumpulan data melalui *database* elektronik *Google Scholar* dengan pedoman PRISMA, yakni *identification, screening, eligibility, dan included*. Ekstraksi dan visualisasi data dengan *Microsoft Excel* dan *Vosviewer*. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan publikasi mengalami peningkatan. Kata kunci “implementasi” dan “kebijakan” paling dominan, terdeteksi 12 kata kunci yang saling berhubungan. Ditemukan 12 kebijakan penanggulangan kemiskinan, mayoritas berupa bantuan sosial. Selain itu, ditemukan enam *critical success factors*, yaitu komunikasi; sumber daya; disposisi; struktur birokrasi; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; serta standar dan tujuan kebijakan. Enam faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Selain itu, analisis *author keyword* menunjukkan bahwa kata kunci “pengawasan” dan “koordinasi” relevan dengan salah satu temuan *critical success factors*, yakni struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** penanggulangan kemiskinan, implementasi kebijakan, *systematic literature review*,

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki sejumlah permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu diperhatikan lebih lanjut, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan tersebut (Wulandari et al., 2022). Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi kemiskinan sebagai permasalahan struktural. Lonjakan angka kemiskinan mencapai titik terparahnya karena krisis ekonomi 1998.



**Gambar 1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Februari 1999 - September 2024**

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa setelah tahun 1999 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif dengan tren cenderung menurun. Terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2006 karena pergeseran posisi kelompok penduduk di sekitar garis kemiskinan rentang periode Februari 2005 – Maret 2006. Selanjutnya, pada Maret 2015 terjadi kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan barang kebutuhan pokok naik juga. September 2020 terjadi dengan adanya guncangan ekonomi yang menyebabkan banyak

masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Kategorisasi pendapatan untuk menentukan apakah individu dapat dikatakan miskin atau tidak di Indonesia mengacu pada garis kemiskinan (GK). Berdasarkan data BPS pada September 2024 individu yang pendapatannya di bawah Rp 595.242,- per kapita per bulan. Garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun seiring naiknya kebutuhan hidup minimum. Dua indikator penting, yakni Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2024. Sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mencerminkan lemahnya respon awal pemerintah menghadapi masa krisis.

Dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama, bahkan di bawah kepemimpinan Soekarno di Orde Lama (Saribulan et al., 2023). Semakin intensif pasca krisis ekonomi 1998. Pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo terbagi menjadi dua periode penting. Pada periode pertama menghadapi situasi pemerintah yang terbelah (*divided government*) yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pada periode kedua berhasil membentuk kesatuan pandangan pemerintah (*unified government*) yang membuka peluang konsolidasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan karena kemiskinan adalah masalah fundamental dibandingkan kebijakan lain, ditunjukkan dengan munculnya amanat UUD RI 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kemiskinan merupakan persoalan akar yang dapat memicu masalah sosial lainnya, seperti banyak anak-anak putus sekolah, banyak pengangguran yang

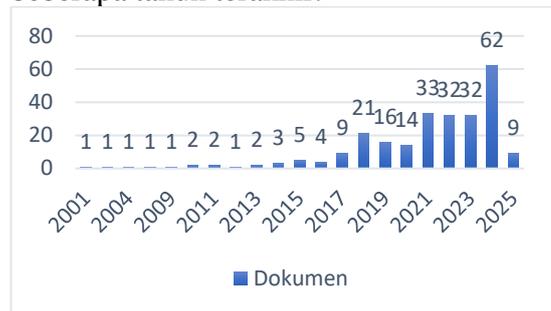
bisa memicu kriminalitas serta kesehatan buruk dengan kekurangan gizi (Piliang, 2023).

Efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah. Akhir kepemimpinan presiden Joko Widodo target angka penurunan kemiskinan belum tercapai secara maksimal hanya 9,22% pada September 2019 dan 8,57 pada September 2024. Lebih jauh. Menurut Piliang (2023) Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam hal penurunan angka kemiskinan karena ketiga negara tersebut lebih responsif dan fokus dalam menangani isu kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan mejadi agenda strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan SDGs. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pelaksanaannya melibatkan 22 kementerian, 6 lembaga, serta pemerintah daerah, dan dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia gagal karena pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan sistem (Pohan & Khairani, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang sistematis untuk merumuskan faktor-faktor keberhasilan (*critical success factors*) dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diterbitkan melalui database elektronik

“Google Scholar” terus meningkat beberapa tahun terakhir.



**Gambar 2 Tabel Produksi Penelitian Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan permasalahan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, penelitian ini akan terkait dengan pentingnya mengkaji secara sistematis berbagai literatur untuk menganalisis struktur perkembangan pengetahuan dan merumuskan *critical success factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua Tahun 2019-2024.

## METODE PENELITIAN

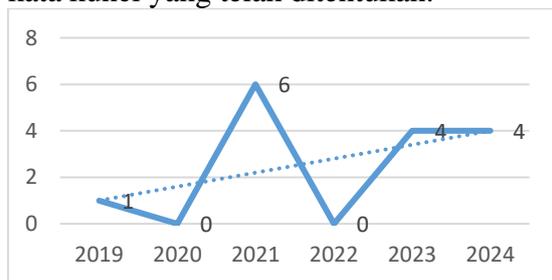
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi berbagai artikel jurnal akademik yang berasal dari database elektronik *Google Scholar* tahun 2019-2024. Artikel dikumpulkan melalui studi literatur dengan *System Literature Review* (SLR). Penggunaan metode SLR untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan dapat menganalisis pola atau tren. Proses SLR dilakukan dengan pedoman PRISMA (*The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses*) dengan empat tahapan, yakni *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Pencarian data menggunakan *string* pencarian, yaitu “faktor keberhasilan” AND “implementasi kebijakan” OR “implementasi program” AND “penanggulangan kemiskinan” OR “pengentasan kemiskinan” AND

“Indonesia” yang berhasil menemukan 256 publikasi. Adapun penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dengan pendekatan *population, intervention, comparasion, outcome, dan study design* (PICOS) yang menghasilkan 22 artikel. Terakhir, tahap penilaian kualitas atau *Quality Assessment* yang menghasilkan temuan 15 artikel sebagai bahan analisis studi literatur. Ekstraksi dan visualisasi data menggunakan bantuan Microsoft Excel dan *VOSviewer*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Publikasi

Identifikasi perkembangan publikasi berdasarkan topik praktik kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terindeks *Google Scholar* dalam rentang tahun 2019-2024 terdapat sebanyak 15 artikel dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.



**Gambar 3 Jumlah Publikasi Artikel Topik Penelitian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

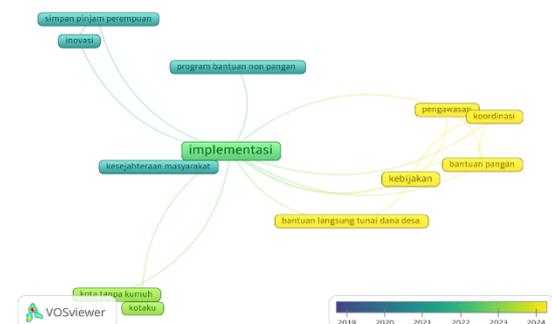
Berdasarkan gambar 3 menunjukkan data jumlah publikasi artikel dari tahun 2019-2024 dengan tren naik berpola fluktuatif. Perkembangan publikasi artikel tertinggi pada publikasi tahun 2021 dengan jumlah publikasi sebanyak 6 artikel. Namun, terdapat keterbatasan penelitian di tahun 2020 dan 2022 yang menunjukkan tidak ada satupun publikasi terkait topik ini berdasarkan hasil seleksi artikel yang telah dilakukan. Secara keseluruhan menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dari waktu ke waktu dan menjadi perhatian akademisi terhadap topik tersebut.

### B. Analisis Tren dan Klasterisasi Literatur

Analisis tren dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak *VOSviewer* dengan analisis *co-occurrence*. Analisis ini berdasarkan pada kata kunci dari 15 artikel yang terindeks *Google Scholar* tahun 2019-2024. Sebanyak 39 *keywords* ditemukan dengan batasan jumlah minimum kemunculan kata kunci adalah 1, 37 kata kunci yang terpilih, dan 12 kata kunci yang saling berhubungan.

#### 1. Analisis Tren Topik Penelitian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Visualisasi kata kunci berdasarkan analisis *overlay visualization*. Tahun pertama implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ditunjukkan dengan pewarnaan biru. Sementara warna yang semakin mengarah ke kuning menunjukkan tren bahasan atau masalah yang dibahas memiliki kebaruan penelitian.



**Gambar 5 Visualisasi Jaringan Kata Kunci pada Topik Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Tahun**

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

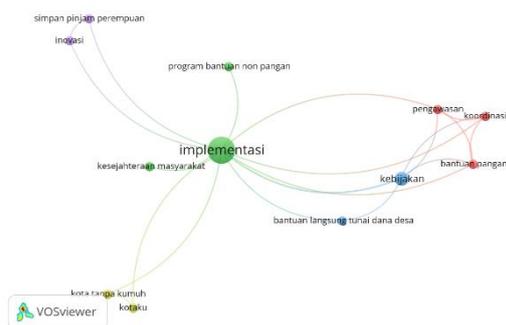
Berdasarkan visualisasi jaringan kata kunci berdasarkan tahun, kata kunci “implementasi” muncul pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi masih mendapat perhatian oleh peneliti dari tahun ke tahun. Kata kunci “implementasi” menjadi pusat jaringan dan memiliki hubungan dengan berbagai istilah kata kunci yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan

kemiskinan. Penelitian pada tahun 2021 memunculkan kata kunci “simpan pinjam perempuan” dan “inovasi”. Adapun kata kunci “program bantuan non tunai”.

Berikutnya, masih di tahun 2021 muncul kata kunci lebih variatif, yakni kata kunci “kesejahteraan masyarakat”. Melangkah ke tahun 2023, kata kunci “kota tanpa kumuh” dan “kotaku”. Pada tahun 2024 muncul kata kunci “kebijakan”; “bantuan pangan”; “koordinasi”, dan “pengawasan”. Terakhir, masih di tahun 2024 muncul kata kunci “kebijakan” dan “bantuan langsung tunai dana desa”.

### Literatur Berdasarkan Kata Kunci

Pemetaan literatur menggunakan *author keywords* dan analisis *network visualization*. Artikel yang dipaparkan dikelompokkan berdasarkan kata kunci yang paling sering muncul.



**Gambar 6 Visualisasi Jaringan Kata Kunci Pada Topik Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Klaster**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Kata kunci utama “implementasi” muncul sebanyak 6 kali. Kata kunci “implementasi kebijakan” dan “program keluarga harapan” menjadi yang paling banyak muncul masing-masing sebanyak 3 kali. Pada klusterisasi kata kunci ini terdapat 5 klaster dengan warna yang berbeda-beda. Terdapat 5 klaster, yaitu klaster 1 berwarna merah, klaster 2 berwarna hijau, klaster 3 berwarna biru, klaster 4 berwarna kuning, dan klaster 5 berwarna ungu. Lintasan jaringan atau ketebalan garis ditentukan oleh seberapa dekat dua istilah saling berhubungan satu

sama lain, sedangkan besarnya ukuran node ditentukan berdasarkan besar frekuensi kata kunci (Permatasari et al., 2023).

Kata kunci “implementasi” dan “kebijakan” memiliki frekuensi kata kunci yang lebih besar terlihat pada ukuran nodenya, hal ini menggambarkan garis hubungan bahwa implementasi dan kebijakan merupakan dua hal yang berkaitan berdasarkan fokus penelitian ini. Kata kunci “implementasi” menghasilkan garis hubungan dengan setiap kata kunci lainnya yang menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang relevan.

### C. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebijakan Kemiskinan di Berbagai Daerah

Dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, identifikasi dilakukan terhadap target atau tujuan yang ingin dicapai masing-masing kebijakan dengan melihat proses pencapaian hasil akhir (*outcome*). Terdapat 12 kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbagai daerah di Indonesia.

#### 1. Program Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan berisi aktivitas yang memaksimalkan peluang ketahanan pangan desa dengan mendorong kearifan lokal Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Implementasinya berhasil dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat karena terbantu dalam pengutan ketahanan pangan (Sajidin et al., 2023).

#### 2. *Urbang Farming*

Program ini merupakan pemanfaatan lahan kosong yang produktif untuk pertanian di perkotaan sehingga mampu meningkatkan pengelolaan makanan bagi penduduk. Selain itu, mampu menciptakan kehidupan yang layak dan mandiri secara ekonomi sebagai pengaruh dari peningkatan pendapatan ekonomi. Implementasi program pertanian perkotaan di Kelurahan Lakarsantri

berhasil meningkatkan lahan produktif, memperkuat perekonomian warga dan menambah kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat (Pradana & Nurharjadmo, 2021).

### **3. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan juga dilakukan di Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang. Program Keluarga Harapan merupakan strategi yang ditetapkan dengan tujuan untuk membantu KPM mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan SDM, mengubah pola pikir serta memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan konsumsi guna memutus rantai kemiskinan. Pelaksanaan berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa hambatan (Kusdinar & Pergiwa, 2021).

### **4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagai bentuk pemerintah dalam mendukung perilaku produktif penerima bantuan. BPNT merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan setiap bulan kepada KPM melalui mekanisme akun elektronik. Pelaksanaan berhasil dengan dukungan koordinasi para aktor meskipun masih ada beberapa kendala (Arianto et al., 2021).

### **5. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Strategi pelayanan sosial anti kemiskinan digunakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk memerangi kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap kelurahan diberikan kewenangan untuk mengajukan calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Susilawati & Khairina, 2023) pelaksanaan program RTLH masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran negara yang menghambat optimalisasi program.

### **6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kemendes PDTT berupa bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada APBDesa untuk diberikan kepada penduduk desa atau wilayah terpencil. Menurut Gumelar et al. (2024) implementasi kebijakan BLT di Desa Cibiruy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa faktor masih belum terlaksana secara optimal.

### **7. Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan**

Kebijakan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan merupakan salah satu jenis bisnis mikro yang dilakukan di rumah dan kebanyakan pemiliknya perempuan. Bertujuan untuk memperdayakan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terciptanya lapangan kerja dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan yang belum optimal dari setiap variabel sehingga pencapaian tujuan belum terwujud (Hartati et al., 2024).

### **8. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kecamatan Sambit di Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas industri yang cukup berkembang. Pemerintah setempat berupaya mengatasinya melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, usaha ekonomi, dan kegiatan kesejahteraan sosial dilakukan dalam semangat kebersamaan. Menurut Fitria & Fachrurazi (2023) program ini berhasil berjalan efektif ditandai dengan peningkatan taraf ekonomi keluarga miskin yang membuka unit usaha keluarga sesuai dengan kemampuannya melalui bantuan modal kerja.

### **9. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Sebuah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diselenggarakan di Kelurahan Dumai Kecamatan Dumai Kota Dumai dengan mengembangkan sistem terpadu pengelolaan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai pengurangan permukiman kumuh di kota melalui penanggulangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Program KOTAKU di Kelurahan Dumai berhasil terlaksana dengan baik, meliputi perbaikan rehabilitasi beton jalan, drainase lingkungan, penyediaan gerobak sampah dan rehabilitasi mobil pemadam kebakaran (Suryani, 2023).

#### **10. Kebijakan Penurunan *Stunting***

Adanya kenaikan prevalensi angka *stunting* di Kota Samarinda yang signifikan maka pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka *stunting* yang diwujudkan dalam penetapan penurunan *stunting* di Kota Samarinda yang diwujudkan dengan peraturan Walikota Samarinda Nomor 102 Tahun 2021. Penurunan *stunting* yang berfokus pada peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan penurunan *stunting* di Kota Samarinda terlaksana dengan adanya peran pemerintah dan Dinas Kesehatan sebagai kunci keberhasilan kebijakan (Septianto et al., 2024).

#### **11. Kebijakan Revolusi Pertanian**

Sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat Kebijakan Revolusi Pertanian dengan sarannya mengupayakan peningkatan luas lahan tani. Kebijakan Revolusi Pertanian ini berlaku dari tahun 2014 hingga 2019 pada masa kepemimpinan Bupati Markus Dairo Talu (MDT) dan Wakil Bupati Ndara Tanggu Kaha yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi pertanian Kabupaten SBD. Berdasarkan hasil penelitian Waskitojati et al. (2019) menilai bahwa pelaksanaan Kebijakan Revolusi Pertanian ini belum mampu menunjukkan bahwa itu itu memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan dalam hal

peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

#### **12. Inovasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Program ini berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan termasuk melalui pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Wajo. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang memberikan bantuan permodalan kepada kelompok perempuan dengan kegiatan simpan pinjam. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan simpan pinjam perdesaan, memfasilitasi pendanaan usaha skala mikro, memberdayakan perempuan dan rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil penelitian (P et al., 2021) menilai pelaksanaannya berhasil memberikan dampak yang cukup baik dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kecamatan Tanasitolo. Daerah tersebut menjadi daerah yang sering dikunjungi bank dunia karena sebutannya sebagai pusat persuteraan.

### **D. Analisis *Critical Success Factors* pada Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**

Identifikasi pada *critical success factors* berikut ini diambil dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari berbagai daerah sebelumnya yang dijabarkan di bawah ini.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi menjadi faktor utama untuk mendukung terjalannya hubungan dan koordinasi yang baik sehingga membuat keberhasilan dalam suatu kebijakan yang dijalankan (Tampati, 2022). Komunikasi yang efektif memerlukan penyampaian informasi yang baik, komunikasi diterima dengan jelas dan tidak membingungkan serta berjalan secara konsisten (Pradana & Nurharjadmo, 2021)

untuk mendapatkan kesepahaman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya (Septianto et al., 2024). Diperlukan SDM yang tepat untuk bisa mentransmisikan setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan (Suryani, 2023).

Sosialisasi sebagai metode komunikasi sering digunakan dalam penyampaian maksud dan proses suatu kebijakan. Sosialisasi perlu didukung dengan pembinaan terhadap kelompok sasaran, tidak cukup dilakukan secara verbal, melainkan juga dengan pemanfaatan media sosial (Kusdinar & Pergiwa, 2021), seperti Instagram yang mampu menyebarkan informasi dengan cara menarik dan diminati oleh generasi muda (Septianto et al., 2024). Adapun metode komunikasi dengan kampanye informasi melalui siaran radio dan media cetak seperti kampanye informasi pentingnya gizi seimbang dan cara mencegah *stunting* (Septianto et al., 2024).

Sosialisasi masih sering dianggap kurang penting oleh masyarakat. Sosialisasi yang tidak menyeluruh ke semua daerah sehingga tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat (Suryani, 2023). Sosialisasi dapat dioptimalkan dengan pelaksanaan rutin setiap bulan kepada kelompok sasaran serta pemanfaatan *whatsapp group* (Arianto et al., 2021). Akan tetapi, komunikasi melalui *whatsapp group* tidak berjalan formal (Hartati et al., 2024).

## **2. Sumber Daya**

Pelaksanaan kebijakan didukung oleh beberapa sumber daya, yakni sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan pemilihan SDM sesuai kriteria (Pradana & Nurharjadmo, 2021). Selain itu, tercermin dari pemerintah desa yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya (Gumelar et al., 2024). Sumber daya manusia yang ideal terdiri dari pelaksana dan penyelenggara yang terampil (Kusdinar & Pergiwa, 2021) dan memerlukan pelatihan berkelanjutan (Kusdinar & Pergiwa, 2021).

Dalam menjalankan tugas, seperti sosialisasi, pelatihan dan pendampingan para pelaksana perlu mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat guna memaksimalkan pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan (Suryani, 2023).

Anggaran merupakan sumber daya penting untuk mendukung biaya operasional, penggunaannya harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan (Pradana & Nurharjadmo, 2021), seperti rencana pengelolaan APBdes yang telah disepakati sebelumnya (Gumelar et al., 2024). Transparansi anggaran sangat penting untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi dengan menyalurkan bantuan langsung ke rekening KPM tanpa melibatkan instansi di tingkat bawah (Arianto et al., 2021). Keterbatasan anggaran mampu menghambat proses pelaksanaan kebijakan (Susilawati & Khairina, 2023). Contohnya, dalam pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo belum mempunyai anggaran memadai sehingga sulit untuk berkembang (Hartati et al., 2024). Selain itu, terbatasnya dana desa sebagai sumber pendanaan kebijakan BLT di Desa Cibiruy menyebabkan realisasi tidak bisa keseluruhan KPM terdaftar (Gumelar et al., 2024).

Ketersediaan fasilitas merupakan sarana dan prasarana pendukung untuk operasional, seperti penerima manfaat yang dengan mudah mengakses bantuan pendapatan pemerintah (Susilawati & Khairina, 2023). Ketersediaan baik adanya pengadaan lahan, peralatan pertanian, area penanaman serta kebutuhan perawatan tanaman (Pradana & Nurharjadmo, 2021). Selain itu, pelaksanaan kebijakan *stunting* perlunya kelayakan puskesmas yang dilengkapi alat-alat medis dasar (Septianto et al., 2024). Namun, ada juga pemerintah dan penyelenggara hanya menyediakan fasilitas pokok-pokoknya saja (Kusdinar & Pergiwa, 2021). Papan informasi yang berisi nama-nama KPM penerima bantuan merupakan bentuk bukti data yang bisa

diberikan pemerintah kepada masyarakat (Gumelar et al., 2024).

### **3. Struktur Birokrasi**

Untuk menghindari fragmentasi yang mengganggu diperlukan struktur birokrasi yang jelas, baik sistem maupun mekanismenya, serta memastikan koordinasi yang baik antar pelaksana dan lembaga (Pradana & Nurharjadmo, 2021). *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan kebijakan (Kusdinar & Pergiwa, 2021) yang menunjukkan komitmen terhadap integritas pelaksanaan dan standarisasi prosedur (Septianto et al., 2024) dan dapat dipertegas dalam bentuk SK (Suryani, 2023). Pelaksana kebijakan perlu mengenal jobdesk masing-masing sehingga menjadi penghambat (Arianto et al., 2021). Pembagian tugas dan peran organisasi pelaksanaan yang tidak jelas hanya akan menimbulkan konflik dan tumpang tindih tanggung jawab (Mangalo et al., 2024), seperti jumlah koordinator daerah yang tidak sebanding dengan jumlah penerima KPM, melainkan berdasarkan demografis (Arianto et al., 2021). Selain itu, tim pendampingan kebijakan tidak sebanding dengan kapasitasnya (Hartati et al., 2024).

Pedoman operasional mendukung untuk efektivitas koordinasi yang sinergi antar sektor (Kusdinar & Pergiwa, 2021). Koordinasi yang baik tercermin dengan terjalannya kerjasama antar berbagai pihak (Gumelar et al., 2024). Contohnya, koordinasi internal tim daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan industri rumahan yang telah melaksanakan berbagai pelatihan, pembinaan dan pameran (Hartati et al., 2024). Tidak berjalannya fungsi koordinasi menghambat pelaksanaan kebijakan (Waskitojati et al., 2019).

Ketidaktepatan sasaran terjadi karena data penerima manfaat tidak selaras (Mangalo et al., 2024) sehingga perlu adanya ketetapan kriteria yang jelas (Susilawati & Khairina, 2023). Selain itu, membutuhkan kemudahan akses data pusat

(Mangalo et al., 2024) melalui sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Morado, 2021). Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki desain sistem birokrasi yang dapat memberikan kemudahan akses bantuan oleh penerima manfaat tanpa administrasi yang berbelit (Susilawati & Khairina, 2023). Pentingnya untuk mengoptimalkan fungsi penunjang serta fungsi pengembangan (Nisra et al., 2021). Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan memerlukan pengawasan sebagai variabel dari stuktur birokrasi. Pengawasan yang efektif didukung oleh prosedur yang terstruktur dan panduan yang jelas sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Mangalo et al., 2024).

### **4. Disposisi**

Disposisi adalah kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Bentuk komitmen para pelaksana diwujudkan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat di forum musyawarah serta acara-acara publik. Selain itu, juga terlibat langsung dalam monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (Sajidin et al., 2023; Suryani, 2023). Keterlibatan serta kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor kunci (Suryani, 2023) yang terbangun melalui komitmen serta dukungan yang konsisten (Pradana & Nurharjadmo, 2021). Selain itu, kesediaan untuk bekerjasama baik penyelenggara, pelaksana lintas sektor (Kusdinar & Pergiwa, 2021). Kerjasama lintas sektor yang sinergi dengan melibatkan sektor-sektor lain yang relevan menjadi kunci dalam implemenetasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Septianto et al., 2024). Faktor disposisi menunjang keberhasilan dalam memastikan bahwa koordinasi antara pelaksana berjalan optimal dan mencapai target yang ditentukan (Sajidin et al., 2023).

### **5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial merupakan kondisi sosial masyarakat yang

memengaruhi respon baik masyarakat sebagai bentuk dukungan masyarakat (Arianto et al., 2021). Masyarakat penerima manfaat pasti akan mendukung penuh adanya kebijakan, sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan dianggap sebagai penolakan (Gumelar et al., 2024). Pemahaman masyarakat tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, dan mempelajari pedoman pelaksanaan program sehingga merasakan dengan jelas dampak positifnya (Sajidin et al., 2023). Kebijakan yang berdampak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tentunya berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (P et al., 2021). Lingkungan sosial masyarakat dalam implementasi kebijakan berkaitan juga dengan mobilitas penduduk (P et al., 2021).

Stabilitas perekonomian masyarakat diharapkan dapat terwujud dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti masyarakat merasa terbantu sehingga pemerintah desa terus memperhatikan pemberian bantuan melalui dana desa (Sajidin et al., 2023). Kondisi ekonomi masyarakat yang rentan berpotensi lebih menyambut berbagai bantuan dari pemerintah dengan sukacita (Morado, 2021). Dibutuhkan dukungan akses ekonomi, seperti adanya ketersediaan modal penting untuk mengembangkan suatu usaha, meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat (Fitria & Fachrurozi, 2023). Kondisi jarak lokasi pelaku usaha yang jauh juga menjadi pertimbangan untuk kegiatan ekonomi dan memengaruhi kelancaran keberjalanan kebijakan. Infrastruktur yang mendukung dapat memberikan kemudahan distribusi bantuan (Gumelar et al., 2024).

Terakhir dari segi politik, untuk mewujudkan kondisi politik yang baik dalam implementasi dibutuhkan kerjasama antara pejabat pelaksana dengan berbagai instansi lain (Morado, 2021). Pemerintah dalam implementasi program ketahanan pangan menyelenggarakan sosialisasi dan musyawarah dengan berbagai kelompok

masyarakat tanpa memilah kelompok kepentingan politik di Desa Simbang (Sajidin et al., 2023). Komitmen pemerintah dan adanya dukungan dari pemangku kepentingan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tepat sasaran dan transparan (Sajidin et al., 2023). Perlu diperhatikan bahwa konsistensi dan harmonisasi kebijakan penting sebagai dasar hukum untuk mekanisme pelaksanaan sesuai dengan target yang ditetapkan (Gumelar et al., 2024). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang stabil pasti saling berkesinambungan sehingga ketiganya akan saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.

## **6. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Kejelasan tujuan, konsistensi tujuan, rasionalitas tujuan, ketetapan strategi dan kelayakan strategi merupakan kondisi kebijakan Kejelasan standar dan tujuan kebijakan terlihat dalam pencantuman pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Simbang, Kabupaten Majene. Tujuan program yang sudah sejalan dengan Perpres No 104 Tahun 2021 (Sajidin et al., 2023). Selain itu, tujuan kebijakan yang berkualitas adalah bersifat rasional bagi kesejahteraan masyarakat seperti tujuan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Cibiruy, Kabupaten Garut yang mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan memberikan stimulus masyarakat dalam meningkatkan daya beli (Gumelar et al., 2024). Pemerintah mengupayakan dalam menentukan tujuan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Nisra et al., 2021).

Ketetapan strategi yang tepat seperti pelaksanaan sosialisasi sebagai metode penyampaian informasi kepada masyarakat dan musyawarah desa sebelum pelaksanaan kebijakan (Gumelar et al., 2024). Di Desa Simbang, Kabupaten Majene menggunakan strategi melalui dua pendekatan khusus, yakni dengan mengurangi beban pengeluaran

masyarakat miskin melalui subsidi dan perlindungan sosial pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin (Sajidin et al., 2023). Dasar hukum pelaksanaan program harus diketahui jelas oleh para pemangku kepentingan (Sajidin et al., 2023).

Berdasarkan temuan enam *critical success factors* dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari berbagai daerah di Indonesia tahun 2019-2024 relevan dan cenderung konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, terdapat dinamika dan pergeseran fokus setiap tahunnya karena penyesuaian strategi berdasarkan pada konteks krisisnya.

### **E. Pembahasan Penelitian**

Temuan keenam *critical success factors* dalam penelitian ini, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta standar dan tujuan kebijakan menunjukkan keterkaitan erat dengan teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn (1975). Hal ini menunjukkan bawah teori tersebut memiliki relevansi dalam menganalisis kebijakan publik dalam konteks penanggulangan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Hasil analisis *author keyword* menggunakan alat bantu *Vosviewer* adanya keterkaitan dengan kemunculan kata kunci “pengawasan” dan “koordinasi” yang memberikan keterhubungan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu *critical success factors* dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dapat menjadi refleksi akhir dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa P1 dan P2 mengalami tren penurunan yang signifikan sejak tahun

2021 hingga 2024. Penurunan P1 menjadi 1,36, sedangkan penurunan P2 menjadi 0,32 pada September 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan, yakni koordinasi antar level pemerintah dan peningkatan efektivitas pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada *output*, tetapi juga pada proses implementasi.

Secara teoritis, pengawasan memegang peranan penting internal organisasi dalam sistem kontrol. Mekanisme pengawasan dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, koordinasi diperlukan untuk memastikan sinergi antar lembaga. Analisis *Vosviewer* memberikan bukti empirik bahwa struktur birokrasi memainkan peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan adanya upaya multisektor. Dalam hal ini, koordinasi menjadi penting, terutama pelibatan koordinasi berbagai Kementerian dan lembaga (K/L) (Alfisyahrin, 2021). Berkaitan dengan koordinasi, Kementerian Sosial dan Kemendes PDTT yang berhasil membangun sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data dan digital melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, perbaikan tata kelola dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat daerah. Adanya TKPK memperkuat kapasitas pengawasan internal dan koordinasi lintas sektor. Hal ini menjawab mengenai bahwa struktur birokrasi sebagai *critical success factors* yang tidak dapat diabaikan dalam efektivitas keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2024.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa publikasi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Analisis tren literatur menggunakan *VOSviewer* mengidentifikasi 37 kata kunci yang membentuk lima klaster, dengan “implementasi” dan “kebijakan” sebagai kata kunci sentral. Tinjauan terhadap 15 artikel periode 2019–2024 mengungkapkan bahwa terdapat 12 kebijakan/program penanggulangan kemiskinan.

Ditemukan enam *critical success factors* dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yakni 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya 3) Struktur Birokrasi, 4) Disposisi; 5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; serta 6) Standar dan Tujuan Kebijakan. Keenam faktor ini memiliki keterkaitan dengan variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki relevansi dalam menganalisis kebijakan publik dalam konteks penanggulangan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, temuan berdasarkan analisis visualisasi *author keyword* menggunakan *VOSviewer* menunjukkan bahwa kata kunci “pengawasan” dan “koordinasi” relevan dengan salah satu temuan *critical success factors*, yakni struktur birokrasi.

Struktur birokrasi menempati posisi utama sebagai faktor penentu efektivitas kebijakan, yang diperkuat oleh bukti bahwa penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencerminkan adanya perbaikan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni atas dukungan faktor koordinasi dan pengawasan. Selain itu, dibuktikan dengan adanya perbaikan tata kelola kementerian/lembaga dengan membentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan (TPKP) setiap daerah.

Dengan demikian, struktur birokrasi dapat diposisikan sebagai *main factor* dalam efektivitas keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019–2024.

## REKOMENDASI

1. Perlunya pengkajian ulang implementasi kebijakan agar lebih berdampak, sesuai kebutuhan, memberdayakan masyarakat miskin, dan berkelanjutan.
2. Penguatan struktur birokrasi melalui koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian kewenangan yang jelas serta pelaksana kebijakan yang kompeten.
3. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti yang didukung data akurat dan indikator kinerja terukur guna meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kepercayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1), 89–99.
- Arianto, D., M. Wantu, S., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1847–1855.  
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i11.470>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Fitria, M., & Fachrurozi, M. (2023). Faktor Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 2(1), 34–40.

- <https://doi.org/10.56916/jimab.v2i1.361>
- Gumelar, R., Susanti, E., & Munjarat, M. D. E. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 15(2), 86–94. <https://doi.org/10.24198/jane.v15i2.49809>
- Hartati, E., Nurdin, N., & Rivai, F. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 29–44. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i1.733>
- Kusdinar, R., & Pergiwa, D. I. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cicitu Kabupaten Sumedang. *Perspektif*, 10(2), 313–320. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4368>
- P, R. A., Agustang, A., Idhan, A. M., & Lambali, S. (2021). Implementasi Inovasi Kebijakan Program (Spp) Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 306–323. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.246>
- Permatasari, R. D. I., Rahmah, A., Zuhroh, F., Hidayat, T. R. P., & Rakhmawati, N. A. (2023). Analisis Bibliometrik Mengenai Serangan Phishing Pada Media Sosial Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, 28(3), 230–240. <https://doi.org/10.35760/ik.2023.v28i3.9514>
- Piliang, M. Z. (2023). Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan, dan Bantuan Sosial. *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 262–284.
- Pohan, A. F., & Khairani. (2025). Prioritas Pengentasan Pembangunan Daerah Kemiskinan Dalam Perspektif Pembangunan Daerah. *Nagari Lae Review*, 2(3), 445–454. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.445-454.2025>
- Pradana, A. R., & Nurharjadmo, W. (2021). Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya. *Wacana Publik*, 1(2), 312–332. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54598>
- Sajidin, M., Tamrin, S. H., & Nurdiyah. (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 803–817. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3315>
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Septianto, A. F., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting di Kota Samarinda. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47041>

- Suryani, L. (2023). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dumai Kota. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(1), 96–105. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i1.2611>
- Susilawati, D., & Khairina, E. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam. *Jurnal Dialektika Publik*, 4(2), 19–28. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v7i1.7272>
- Waskitojati, D., Kameo, D., & Wiloso, P. G. (2019). Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), *NTT. AGRIC: Journal of Agricultural Science*, 31(2), 159–176. <https://doi.org/10.24246/agric.2019.v31.i2.p158-175>
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3209–3217. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1347>